

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah kabupaten/kota yang mana setiap daerah kabupaten/kota tersebut memiliki pemerintah daerah. Daerah di Indonesia memiliki asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagai wujud dari kebijakan desentralisasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Tujuan implementasi otonomi daerah antara lain adalah lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan agar lebih mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada pada wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah. Berikut adalah tabel realisasi Pedapatan asli daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah Kabupaten Probolinggo periode 2012 s/d 2021.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Probolinggo 2012-2021

	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak Daerah (PD)	Retribusi Daerah (RD)
Kabupaten Probolinggo 2012-2021	2012	Rp. 90.009.457,31	Rp. 17.352.155,28	Rp. 24.216.968,97
	2013	Rp. 108.551.361,75	Rp. 20.438.494,72	Rp. 25.976.527,80
	2014	Rp. 195.263.672,27	Rp. 32.996.575,72.	Rp. 36.371.140,95
	2015	Rp. 184.119.656,43	Rp. 30.885.000,00	Rp. 18.993.050,00
	2016	Rp. 227.719.364,52	Rp. 44.177.889,18	Rp. 24.754.164,13
	2017	Rp. 310.668.739,49	Rp. 58.008.585,64	Rp. 24.687.015,70
	2018	Rp. 234.483.636,96	Rp. 62.605.153,08	Rp. 27.723.525,67
	2019	Rp. 254.431.703,86	Rp. 65.409.953,75	Rp. 35.384.854,98
	2020	Rp. 254.884.191.561,70	Rp. 63.800.464.846,00	Rp. 13.692.528.875,00
	2021	Rp. 296.818.784.519,64	Rp. 65.824.089.337,00	Rp. 15.615.658.777,00

Sumber : <https://probolinggokab.bps.go.id>

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu daerah yang dapat dikatakan mempunyai *track record* yang cukup baik dalam hal pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dapat diproaksikan ke dalam PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode biasanya satu tahun (Mononimbar, Walewangko dan Samual, 2017). Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan juga jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Berikut adalah diagram pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo yang diukur dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) periode 2015 s/d 2019.

Tabel 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Probolinggo Tahun 2011
– 2021 (miliar rupiah)

Kabupaten Probolinggo	Tahun	PDRB ADHK
	2012	Rp.16.936.763,0
	2013	Rp. 17.808.887,3
	2014	Rp. 18.682.208,8
	2015	Rp. 19.570.993,3
	2016	Rp.20.504.086,7
	2017	Rp. 21.418.246,7
	2018	Rp. 22.74.573,7
	2019	Rp. 23.395.250,9
	2020	Rp. 22.898.238,6
	2021	Rp. 23.664.387,7

Sumber : <https://probolinggokab.bps.go.id>

Penelitian yang mengkaji Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi sebelumnya telah dilakukan oleh Tri Setyobudi, Slamet Rahmadi, Parmadi (2021) dengan judul Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, yang berkesimpulan bahwa secara parsial (individu) maupun Bersama-sama, pajak daerah dan retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi selama periode 2002-2018.

Miswar, Putri Yudistira Lianda, Riha Dedi Priantana (2021) dengan judul Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh, yang berkesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan penelitian analisis pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh 2005-2019 dengan menggunakan regresi linier berganda, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, baik secara parsial dan simultan. Pada

penelitian ini hanya menggunakan dua variabel saja untuk melihat pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu diteliti variabel lain.

Reggie W. Mononimbar, Een N. Walewangko, Jacline Sumual (2017) dengan judul Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening di Kabupaten Minahasa Selatan 2005-2014 yang berkesimpulan bahwa Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun kesimpulan kedua yakni, Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah Bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa.

Yurianto, Akhmad Tantowi (2021) dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta. Yang menyatakan pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah ini, tak terkecuali pemerintah daerah melalui berbagai reformasi perpajakan daerah. Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan. Penerimaan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan daerah. Data pada periode penelitian 1987-2019 menunjukkan penerimaan pajak daerah terus meningkat setiap tahun dan juga menjadi sumber utama penerimaan Pemprov DKI Jakarta. Begitu juga pertumbuhan ekonomi relatif stabil, kecuali periode 1997-1999. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta selama periode 1987-2019.

Sunarto, Y Sunyoto (2016) dengan judul Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Kemandirian Daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah (studi empiris pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah). Yang

menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah, Retribusi daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah, Pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam penelitian terdahulu tersebut belum ada yang melakukan penelitian dengan objek Kabupaten Probolinggo, dan hasilnya pun memiliki hasil yang relatif berbeda sehingga dianggap kurang konsisten. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti kembali tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pembaharuan model penelitian dengan menggunakan variabel moderasi yaitu belanja daerah yang menjadi pembeda dengan penelitian yang sebelumnya. Selain itu jumlah periode penelitian lebih panjang dari penelitian sebelumnya agar dapat diperoleh hasil yang lebih baik dan relevan.

Sebagai salah satu putra daerah Probolinggo, saya memiliki ketertarikan untuk meneliti bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo, dan juga melihat beberapa jurnal penelitian tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada yang membahas tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo.

Sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak penerangan jalan. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga memiliki peran penting pada Penetapan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada pribadi atau badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan juga pemeratakan perekonomian masyarakat di daerahnya. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga

golongan, yakni retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di jalan, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, yang berakibat terhadap meningkatnya pelayanan dalam masyarakat dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Probolinggo.

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi mutlak harus dilakukan oleh pemerintah agar mampu untuk membiayai kebutuhan sendiri serta menyejahterakan rakyat, sehingga diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat berkurang dan akhirnya dapat mandiri. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo.

Dari penjelasan di atas, maka untuk mengetahui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dapat dilakukan melalui penelitian dengan judul **“Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel Intervening di Kabupaten Probolinggo”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo melalui belanja daerah?
4. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo melalui belanja daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten probolinggo melalui belanja daerah sebagai variabel intervening
4. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten probolinggo melalui belanja daerah sebagai variabel intervening

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipergunakan:

a. Manfaat teoritis dan akademik

Penelitian ini guna untuk memberikan edukasi sehingga diharapkan dapat menambah literatur bagi peneliti lain dan dapat menjadi tumpuan akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan di bidang akuntansi

b. Manfaat praktis

Penelitian ini berguna bagi penulis sekaligus peneliti untuk mengetahui analisis tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini juga berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam hal pengembangan

wawasan di bidang retribusi daerah dalam pemerintah daerah serta ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan kenyataan yang ada. Penelitian ini juga sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah secara tidak langsung akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sehingga dapat menunjang perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.